

ACCOUNTING GOVERNMENTS OF STANDARDS INSIDE PREPARATION FINANCIAL STATEMENTS IN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

Herry Novrianda¹⁾
¹⁾Universitas Terbuka

Email: ¹⁾ herry.novrianda@ecampus.ut.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [18 November 2024]

Revised [11 Desember 2024]

Accepted [31 Januari 2025]

KEYWORDS

Accounting Government Standards, Balance Sheet, Statement of Budget Realization

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Metode analisis menggunakan metode komperatif (perbandingan) yaitu membandingkan antara penyajian laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang meliputi laporan realisasi anggaran dan neraca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setda Kota Bengkulu pada tahun 2023 dalam menyajikan laporan realisasi anggaran secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali pada penyajian pendapatan transfer; seharusnya transfer lain-lain dari dana yang disahkan disajikan dengan rinci, pada penyajian belanja operasi seharusnya subsidi juga harus disajikan. Setda Kota Bengkulu pada tahun 2023 dalam menyajikan neraca secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali pada penyajian aset lancar yakni pos piutang dana bagi hasil seharusnya dipisah dan diuraikan lebih rinci penyajian kewajiban pos lancar bagian utang jangka panjang lainnya harus disajikan terpisah bagian lancar utang jangka panjang dan dalam negeri.

ABSTRACT

The aim of the research is to determine the application of government accounting standards in preparing the financial reports of the Bengkulu City Regional Secretariat. The analysis method uses a comparative method, namely comparing the presentation of the financial reports of the Bengkulu City Regional Secretariat with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) which includes budget realization reports and balance sheets. The results of the research show that the Bengkulu City Regional Secretariat in 2023 in presenting budget realization reports is generally in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards except for the presentation of transfer income; Other transfers from authorized funds should be presented in detail, when presenting operating expenditure subsidies should also be presented. The Bengkulu City Regional Secretariat in 2023, in presenting the balance sheet, is generally in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, except that in presenting current assets, namely profit sharing fund receivables, it should be separated and explained in more detail. The presentation of current liabilities, other long-term debt, must be presented separately, the current part of long-term and domestic debt.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang sering dibicarakan saat ini. Good governance merupakan manifestasi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah. Menurut Mardiasmo (2004:18) good governance adalah sebagai salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi,

penghindaran salah alokasi dan investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif.

Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, sedangkan partisipasi maksudnya ikut serta dalam keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan.

Good Governance akan tercapai apabila ada perubahan dari sistem semula serba sentralistis yaitu kebijakan ada pada pemerintahan pusat menjadi sistem yang baru yaitu sistem yang menginginkan adanya perubahan dimana nantinya pemerintah daerah tidak tergantung lagi dengan pemerintahan pusat, sehingga pemerintah daerah lebih mandiri dan otonom. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kebijakan otonomi kepada daerah, otonomi ini nantinya dapat menimbulkan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adanya reformasi dalam Keuangan Negara, maka perlu perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang Keuangan Negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintah yang paling diinginkan adalah adanya standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas pada gilirannya akan dapat membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga good governance dapat tercapai.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 merupakan pelaksanaan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan ditentukan oleh suatu komite standar yang independen dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. Standar akuntansi pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan keuangan. Draf SAP ini terdiri dari kerangka konseptual dan 11 Pernyataan Konseptual dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan.

Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya standar oleh pemerintah maka setiap entitas laporan akan memiliki pedoman dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang di hasilkan nantinya akan mudah di pahami oleh para pengguna laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP juga akan membantu tercapainya good governance, karena penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP mengandung unsur transparansi. Namun kenyataannya sesungguhnya di lingkungan pemerintah daerah, masih banyak yang belum menerapkan SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, untuk itu perlu penegasan dari pemerintah agar setiap instansi yang menyusun laporan keuangan wajib menerapkan SAP dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan, sehingga dengan begitu laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan yang diharapkan dan akan membantu good governance.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan laporan keuangan dalam rangka penanggung jawaban pelaksanaan APBD yang di lakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer yang sesuai SAP, dengan adanya SAP diharapkan laporan keuangan yang di buat oleh penyusun laporan keuangan di daerah khususnya pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu benar-benar berkualitas sesuai dengan standar yang telah di terapkan. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah di terapkan pada penyusunan laporan keuangan, maka disini di tuntut suatu pemahaman pegawai yang mengelolah keuangan terhadap penyusunan laporan keuangan sehingga laporan yang di hasilkan nantinya berkualitas untuk organisasi dalam mengambil keputusan.

LANDASAN TEORI

Dasar Akuntansi

Menurut Halim (2004:38) dasar dari akuntansi antara lain:

a) Cash Basis

Pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan bila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

b) Accrual Basis

Mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

c) Modified Cash Basis

Mencatat transaksi dengan basis kas selama setahun anggaran dan melakukan penyusunan pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d) Modified Accrual Basis

Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi

Dasar akuntansi yang digunakan pemerintahan saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah basis kas menuju akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh Accounting Principle Board (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut: Menurut Halim (2004:138) "Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan".

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pasal 32 (1) UU Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa isi dan bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun oleh komite standar yang independen dan di tetapkan oleh pemerintah, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif yaitu mencari, mengumpulkan dan mengolah data-data berupa laporan keuangan untuk selanjutnya diinterpretasikan dan diperbandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat ditarik kesimpulan

Definisi Operasional

- Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.
- Laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang di lakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2023.
- Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasinya dalam pelaporan tahun 2023

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

b. Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berdasarkan buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode komperatif (perbandingan) yaitu membandingkan antara penyajian laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang meliputi laporan realisasi anggaran dan neraca sehingga dapat diketahui kesesuaian laporan yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu

Bersadarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan susunan oeganisasi Pemerintahan kota yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No.8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Setda Kota Bengkulu, dimana Bagian Keuangan Setda Kota Bengkulu terdiri dari satu kepala Bagian dan Tiga Kasubbag, yaitu: Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Pembukuan.

Bagian keuangan sekretariat Daerah Bengkulu memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program perubahan dan perhitungan APBD serta pembinaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, bagian keuangan sekretariat daerah kota Bengkulu memiliki fungsi yang berpedomanan kepada peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Peraturan Materi Dalam Negeri RI no.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur Organisasi Setda Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Setda Kota Bengkulu, maka strukur organisasi Bagian Keuangan Sekrektariat Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut:

Gambar 2. Strukur organisasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu



Sumber ; Setda Kota Bengkulu 2023

Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023

Dari hasil penelitian dilakukan analisis penerapan pos-pos dalam laporan realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tahun 2023 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana akan lebih memfokuskan pada Pernyataan SAP tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan.

Tabel 1. Perbandingan Penyajian Pendapatan Setda Kota Bengkulu Tahun 2023 dengan SAP

1	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	
2	Pendapatan pajak daerah	Pendapatan pajak daerah	Sesuai
3	Pendapatan retribusi daerah	Pendapatan retribusi daerah	Sesuai
4	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Sesuai
5	Lain-lain PAD yang disahkan	Lain-lain PAD yang disahkan	Sesuai
6	Pendapatan transfer	Pendapatan transfer	
7	Transfer pemerintah pusat-dana	Transfer pemerintah pusat-dana	Sesuai
8	perimbangan	perimbangan	Sesuai
9	Dana bagi hasil pajak	Dana bagi hasil pajak	Sesuai
10	Dana bagi hasil sumber daya alam	Dana bagi hasil sumber daya alam	Sesuai
11	Dana alokasi umum	Dana alokasi umum	Sesuai
12	Dana alokasi khusus	Dana alokasi khusus	Sesuai
13	Transfer pemerintah pusat lainnya	Transfer pemerintah pusat lainnya	Sesuai
14	Dana otonomi khusus	Dana otonomi khusus	Sesuai
15	Dana penyesuaian	Dana penyesuaian	Sesuai
16	Transfer pemerintah provinsi	Transfer pemerintah provinsi	Sesuai
17	Pendapatan bagi hasil pajak	Pendapatan bagi hasil pajak	Sesuai
18	Pendapatan bagi hasil lainnya	Pendapatan bagi hasil lainnya	Sesuai
19	-	Lain-lain pendapatan yang disahkan	Tidak sesuai
20	-	Pendapatan hibah	Tidak sesuai
21	-	Pendapatan dana darurat	Tidak sesuai
22	-	Pendapatan lainnya	Tidak sesuai

Sumber ; data diolah 2024

Dari penyajian pendapatan dalam realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tahun 2023, diketahui bahwa Setda Kota Bengkulu telah menyajikan pos-pos pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali pada penyajian pendapatan transfer, seharusnya Setda Kota Bengkulu menyajikan pendapatan transfer lain-lain yang disahkan, hal ini dimaksudkan supaya dapat memberikan informasi bagi yang memerlukan mengenai transfer lain-lain yang disahkan Setda Kota Bengkulu.

Belanja

Berdasarkan rekapitulasi hasil perbandingan data antara penyajian belanja dilaporan realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tahun 2023 pada lampiran 2 dengan penyajian belanja di format laporan realisasi anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada lampiran 4, maka dibuatlah tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Penyajian Belanja Setda Kota Bengkulu tahun 2023 dengan SAP

1	Belanja Operasi	Belanja Operasi	
2	Belanja pegawai	Belanja pegawai	Sesuai
3	Belanja barang dan jasa	Belanja barang	Sesuai
4	Bunga	Bunga	Sesuai
5	-	Subsidi	Tidak sesuai
6	Hibah	Hibah	Sesuai
7	Bantuan sosial	Bantuan sosial	Sesuai
8	Belanja modal	Belanja Modal	
9	Belanja tanah	Belanja tanah	Sesuai
10	Belanja peralatan dan mesin	Belanja peralatan dan mesin	Sesuai
11	Belanja gedung dan bangunan	Belanja gedung dan bangunan	Sesuai
12	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	Sesuai
13	Belanja aset lainnya	Belanja aset lainnya	Sesuai
14	Belanja tak terduga	Belanja tak terduga	
15	Belanja tak terduga	Belanja tak terduga	Sesuai

Sumber ; data diolah 2024

Dalam penyajian belanja dalam laporan realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tahun 2023, diketahui bahwa Setda Kota Bengkulu telah menyajikan pos-pos belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali pada penyajian Belanja Operasi seharusnya pos belanja subsidi disajikan secara terpisah.

Pembiayaan

Berdasarkan rekapitulasi hasil perbandingan data antara penyajian pembiayaan di laporan realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tahun 2023 dengan penyajian pembiayaan format laporan realisasi anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, maka dibuat kesimpulan bahwa penyajian pembiayaan di laporan realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tidak sesuai dengan SAP, karena Setda Kota Bengkulu tidak sama sekali menyajikan pos pembiayaan, seharusnya menurut SAP pos pembiayaan disajikan klasifikasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sehingga pembaca dapat mengetahui informasi penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali pinjaman, pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah maupun pemerintah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Setda Kota Bengkulu tahun 2023 dalam menyajikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada laporan realisasi anggaran telah menampilkan Surplus/(Defisit) atas realisasi seluruh pendapatan dan belanja tahun 2023 ditambah dengan sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan sehingga penyajiannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No

Analisis Penyajian Neraca Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023

Dari hasil penelitian dilakukan analisis penyajian pos-pos dalam neraca Setda Kota Bengkulu tahun 2023 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana akan lebih memfokuskan pada Penyajian Neraca.

a. Aset

Berdasarkan rekapitulasi hasil perbandingan data antara penyajian aset di neraca Setda Kota Bengkulu tahun 2023 pada lampiran 1 dengan penyajian aset di format neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada lampiran 3, maka dibuatlah tabel perbandingan kesesuaian penyajian dengan SAP sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Penyajian Aset Setda Kota Bengkulu tahun 2023 dengan SA

1	Aset	Aset	
2	Aset lancar	Aset lancar	
3	Kas	Kas di kas daerah	Sesuai
4	Kas dibendahara pengeluaran	Kas dibendahara pengeluaran	Sesuai
5	Kas dibendahara penerimaan	Kas dibendahara penerimaan	Sesuai
6	Investasi jangka pendek	Investasi jangka pendek	Sesuai
7	Piutang pajak	Piutang pajak	Sesuai
8	Piutang redistribusi	Piutang redistribusi	Sesuai
9	-	Bagian lancar pinjaman kpd perusahaan negara	Tidak sesuai
10	-	Bagian lancar pinjaman kpd perusahaan daerah	Tidak sesuai
11	-	Bagian lancar pinjaman kpd pemerintah pusat	Tidak sesuai
12	-	Bagian lancar pinjaman kpd pemerintah daerah lainnya	Tidak sesuai
13	Bagian lancar tuntutan perbendaharaan	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	Sesuai
14	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	Bagian lancar tuntutan perbendaharaan	Sesuai
15	Piutang lainnya	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	Sesuai
16	Persediaan	Piutang lainnya	Sesuai
17		Persediaan	Sesuai
18	Investasi Jangka Panjang	Investasi Jangka Panjang	
19	Investasi non permanen	Investasi non permanen	
20	Pinjaman kepada perusahaan negara	Pinjaman kepada perusahaan negara	Sesuai
21	Pinjaman kepada perusahaan daerah	Pinjaman kepada perusahaan daerah	Sesuai
22	Pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya	Pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya	Sesuai
23	Investasi dalam surat utang negara	Investasi dalam surat utang negara	Sesuai
24	Investasi dalam proyek pembangunan	Investasi dalam proyek pembangunan	Sesuai
25	Investasi non permanen lainnya	Investasi non permanen lainnya	Sesuai
26	Investasi permanen	Investasi permanen	
27	Periyertaan modal pemerintah daerah	Periyertaan modal pemerintah daerah	Sesuai
28	Investasi permanen lainnya	Investasi permanen lainnya	Sesuai
29	Aset Tetap	Aset Tetap	
30	Tanah	Tanah	Sesuai
31	Perlataan dan mesin	Perlataan dan mesin	Sesuai
32	Gadung dan bangunan	Gadung dan bangunan	Sesuai
33	Jalan, irigasi dan jaringan	Jalan, irigasi dan jaringan	Sesuai
34	Aset tetap lainnya	Aset tetap lainnya	Sesuai
35	Konstruksi dalam pengerjaan	Konstruksi dalam pengerjaan	Sesuai
36	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyusutan	Sesuai
37	Dana Cadangan	Dana Cadangan	
38	Dana Cadangan	Dana Cadangan	Sesuai
39	Aset Lainnya	Aset Lainnya	
40	Tagihan penjualan angsuran	Tagihan penjualan angsuran	Sesuai
41	Tuntutan perbendaharaan	Tuntutan perbendaharaan	Sesuai
42	Tuntutan ganti rugi	Tuntutan ganti rugi	Sesuai
43	Kemitraan dengan pihak ketiga	Kemitraan dengan pihak ketiga	Sesuai
44	Aset tidak berwujud	Aset tidak berwujud	Sesuai
45	Aset lainnya	Aset lainnya	Sesuai

Sumber: data diolah, 2023

Dalam penyajian aset Setda Kota Bengkulu tahun 2023, diketahui bahwa Setda Kota Bengkulu telah menyajikan pos-pos aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali pada penyajian aset lancar seharusnya piutang dana bagi hasil dapat diuraikan dengan jelas seperti kepada perusahaan negara, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan rekapitulasi hasil perbandingan data antara penyajian kewajiban dineraca Setda Kota Bengkulu tahun 2023 pada lampiran 1 dengan penyajian kewajiban di format neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada lampiran 3, maka dibuatlah perbandingan kesesuaian penyajian SAP sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Penyajian Kewajiban Setda Kota Bengkulu tahun 2023 dengan SAP

1	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Pendek	
2	Utang perhitungan pihak ketiga	Utang perhitungan pihak ketiga	Sesuai
3	Utang bunga	Utang bunga	Sesuai
4	-	BLUDN-Pemerintan Pusat	Tidak sesuai
5	-	BLUDN-pemerintah daerah lainnya	Tidak sesuai
6	-	BLUDN-lembaga keuangan bank	Tidak sesuai
7	-	BLUDN-lembaga keu bukan bank	Tidak sesuai
8	-	BLUDN-obligasi	Tidak sesuai
9	Bagian lancar utang jangka panjang lainnya	Bagian lancar utang jangka panjang lainnya	Sesuai
10	Pendapatan diterima dimuka	Pendapatan diterima dimuka	Sesuai
11	Utang jangka panjang lainnya	Utang jangka panjang lainnya	Sesuai
12	Kewajiban Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Panjang	
13	Utang dalam negeri-pemerintah pusat	Utang dalam negeri-pemerintah pusat	Tidak sesuai
14	Utang dalam negeri-pemerintah daerah lainnya	Utang dalam negeri-pemerintah daerah lainnya	Tidak sesuai
15	Utang dalam negeri-lembaga keu bank	Utang dalam negeri-lembaga keu bank	Tidak sesuai
16	Utang dalam negeri-lembaga keu bukan bank	Utang dalam negeri-lembaga keu bukan bank	Tidak sesuai
17	Utang dalam negeri-obligasi	Utang dalam negeri-obligasi	Tidak sesuai
18	Utang jangka panjang lainnya	Utang jangka panjang lainnya	Tidak sesuai

Sumber: data diolah, 2023

Dalam penyajian kewajiban Setda Kota Bengkulu tahun 2023 telah menyajikan pos-pos kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali pada penyajian kewajiban jangka pendek terdapat pos yang tidak disajikan yaitu pos bagian lancar utang dalam negeri (BNLUDN), seharusnya Setda Kota Bengkulu pos bagian lancar utang jangka panjang lainnya dapat diuraikan lagi menjadi bagian lancar utang dalam negeri.

b. Ekuitas Dana

Berdasarkan rekapitulasi hasil perbandingan data antara penyajian ekuitas dana di neraca Setda Kota Bengkulu tahun 2012 pada lampiran 1 dengan penyajian ekuitas dana di format neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada lampiran 3, maka dibuatlah tabel perbandingan kesesuaian penyajian dengan SAP sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Penyajian Ekuitas Dana Setda Kota Bengkulu tahun 2023 dengan SAP

1	Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Lancar	
2	Sisa lebih pembayaran anggaran (SiLPA)	Sisa lebih pembayaran anggaran (SiLPA)	Sesuai
3	Pendapatan yang ditangguhkan	Pendapatan yang ditangguhkan	Sesuai
4	Cadangan piutang	Cadangan piutang	Sesuai
5	Cadangan persediaan	Cadangan persediaan	Sesuai
6	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Sesuai

Dalam penyajian ekuitas dana pada neraca Setda Kota Bengkulu tahun 2023 telah menyajikan pos-pos kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembahasan

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Laporan realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tahun 2023 (lampiran 2) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan Pemerintah Kota Bengkulu yang masih-masing diperbandingkan dengan anggaran tahun 2023, mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan. Setda Kota Bengkulu pada tahun 2023 dalam menyajikan laporan realisasi anggaran secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali pada penyajian pendapatan transfer; seharusnya transfer lain-lain dari dana yang disahkan disajikan dengan rinci, pada penyajian belanja operasi seharusnya subsidi juga harus disajikan.

Neraca daerah merupakan salah satu dari laporan keuangan daerah. Neraca daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintahan Kota Bengkulu menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca.

Pemerintah Kota Bengkulu sejak tahun 2009 telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 23B Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bengkulu dimana peraturan ini secara garis besar merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas dasar Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 23B Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu menyusun neraca Pemerintahan Bengkulu Tahun 2023, dimana neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Bengkulu mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2023. Neraca Pemerintahan Kota Bengkulu Tahun 2023 mencantumkan pos-pos yaitu aset lancar; investasi Jangka panjang; aset tetap; kewajiban; ekuitas dana.

Setda Kota Bengkulu pada tahun 2023 dalam menyajikan neraca secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Keuangan, kecuali pada penyajian aset lancar yakni pos piutang dana bagi hasil seharusnya dipisah dan diuraikan lebih rinci, penyajian kewajiban yakni pos bagian lancar utang jangka panjang lainnya seharusnya disajikan secara terpisah menjadi bagian lancar utang jangka panjang dan dalam negeri.

Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah adalah mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.

Akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut Wurita (2011:12), di dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hendaknya setiap Pemda merumuskan strategi yang dimulai dari aturan pelaksanaan menyangkut penyusunan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi, kemudian pengembangan sistem akuntansi dan teknologi informasi, pengembangan kapasitas SDM, semua itu harus disosialisasikan agar ada keseragaman pandangan di dalam pelaksanaan teknis akuntansi diseluruh SKPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan terhadap analisis penyajian neraca dan laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan Setda Kota Bengkulu tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

- a) Setda Kota Bengkulu pada tahun 2023 dalam menyajikan laporan realisasi anggaran secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali pada penyajian pendapatan transfer; seharusnya transfer lain-lain dari dana yang disahkan disajikan dengan rinci, pada penyajian belanja operasi seharusnya subsidi juga harus disajikan.
- b) Setda Kota Bengkulu pada tahun 2023 dalam menyajikan neraca secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali pada penyajian aset lancar yakni pos piutang dana bagi hasil seharusnya dipisah dan diuraikan lebih rinci, penyajian kewajiban yakni pos bagian lancar utang jangka panjang lainnya seharusnya disajikan secara terpisah menjadi bagian lancar utang jangka panjang dan dalam negeri.
- c) Belum sesuai penerapan laporan neraca Setda Kota Bengkulu pada tahun 2023 karena masih menerapkan akuntansi basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 atau dalam masa transisi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual murni.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Pemerintahan Kota Bengkulu dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah telah berpedoman sepenuhnya pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya dalam penyajian nama laporan keuangan tidak lagi mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tetapi pada peraturan yang terbaru Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 agar penyajian laporan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan Laporan Keuangan Daerah yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan tersebut.
- 2) Pos kas pada aset lancar di neraca Setda Kota Bengkulu tahun 2023 agar disajikan secara terpisah, antara pos kas dikas daerah, pos kas dibendahara pengeluaran dan pos kas dibendahara penerimaan.
- 3) Pos piutang pada aset lancar di neraca Setda Kota Bengkulu tahun 2023 agar disajikan secara terpisah, antara pos piutang pajak dan pos piutang retribusi.
- 4) Pos investasi permanen dan non permanen pada investasi jangka panjang di neraca Setda Kota Bengkulu tahun 2023 agar dapat diuraikan dengan jelas sub-sub pos yang ada didalamnya.
- 5) Pos tuntutan perbendaharaan pada aset lainnya di neraca Setda Kota Bengkulu tahun 2023 supaya dapat disajikan atau dipisahkan dari pos tuntutan ganri rugi.
- 6) Pos bagian lancar utang dalam negeri dan pendapatan diterima dimuka pada kewajiban jangka pendek serta pos utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya pada kewajiban jangka panjang di laporan realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tahun 2023 dapat diuraikan dengan jelas dan disajikan.

- 7) Pos transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan yang disahkan pada Pendapatan Transfer serta Pos bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial pada Belanja Operasi di laporan realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tahun 2023 agar disajikan sesuai dengan SAP.
- 8) Pos belanja langsung/atau tidak langsung di laporan realisasi anggaran Setda Kota Bengkulu tahun 2023 agar diubah namanya menjadi belanja operasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustini, G., Azuwandri, A., Putra, M. B. E., & Novrianda, H. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, 3(2), 109-118.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik tentang Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta : Selemba Empat.
- Ahyari, Agus. 2013. Efisiensi Persediaan Bahan. BPF, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Muhamad. 2011. Analisa Penyajian Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Skripsi. Bengkulu. Universitas Dehasen
- Nazir. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Republik Indonesia.
- Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, 2013. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2012. Bengkulu
- Sugiyono, 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.
- Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta. Republik Indonesia.
- Wurita. 2011. Analisa Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintahan Provinsi Bengkulu Skripsi. Bengkulu. Universitas Dehasen
- Aminudin. 2015. Prinsip-Prinsip Riset Operasi. Jakarta : Erlangga.